

## DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Abid Muhtarom**

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan  
abid@unisla.ac.id

### ABSTRAK

*Struktur dan ragam pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda yang disebabkan sektor potensial antar daerah berbeda. Mengakibatkan antar daerah terjadi disparitas pendapatan regional di semua daerah. Penelitian ini, menggunakan data sekunder PDRB untuk melihat pola pertumbuhan, seberapa besar tingkat disparitas yang terjadi, serta sektor unggulan pada daerah maju. Dari 29 kabupaten dan 9 kota, terdapat 22 kabupaten dan 1 kota tergolong daerah relatif tertinggal. Tingkat disparitas pendapatan, dengan menggunakan analisis indeks williamson (Vw), disparitas antar daerah mengalami peningkatan sedangkan analisis indeks entropi theil (Td) disparitas pendapatan mengalami penurunan. Upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur melalui Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2030, mengenai kawasan andalan. Sektor unggulan kompetitif (C'ij) dan spesialisasi (Aij) di Kota Surabaya, adalah sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. Kota Malang, sektor unggulan (C'ij) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian hanya spesialisasi (Aij) namun menjadi kawasan andalan. Kota madiun, sektor dengan C'ij namun tidak memiliki Aij, pada sektor pertanian, jasa-jasa; pengangkutan dan transportasi; serta perdagangan, hotel dan restoran namun menjadi kawasan andalan. Sedangkan di Kabupaten Gresik, sektor pertambangan dan penggalian meskipun memiliki C'ij dan Aij positif, namun tidak menjadi kawasan andalan di Kabupaten Gresik.*

**Kata kunci:** *disparitas Regional, kawasan andalan, RTRW*

### 1. PENDAHULUAN

Disparitas perekonomian antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing.

Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial (*social strain*) tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

Menurut teori Oscar Lange, dengan adanya desentralisasi, pengaturan dan pengawasan birokrasi lebih dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya kebijakan tersebut pemerintah pusat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah yang mandiri (Jhingan, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi atau proses yang akan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah menjadi meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan ini, dapat di terima oleh pemerintah daerah bila adanya kekuatan investasi modal yang mengalami perubahan secara terus-menerus menjadi lebih baik, kemudian adanya keinginan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang oleh masyarakat (Suryana, 2000:55). Menurut Mardiasmo (2002:2), semakin tinggi investasi modal akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan ekonomi yang dapat ditinjau dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kenaikan PDRB tersebut mengakibatkan adanya perubahan sektoral dan struktural di suatu wilayah. Proses terjadinya transformasi struktural, dari sektor pertanian menuju sektor industri atau jasa, namun di setiap sektornya mengalami transformasi yang berbeda-beda (Prawira, 2011). Perbedaan struktur perekonomian karena kemampuan atau keunggulan di setiap wilayah berbeda dengan wilayah yang lain (Usya, 2006). Menurut Kartasmita (1996) yang mengatakan bahwa tidak ada daerah yang memiliki karakteristik sama, sehingga perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi perbedaan potensi dan struktur ekonomi sehingga dalam proses perencanaan pembangunan di setiap wilayah perlu adanya perlakuan khusus.

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Kabupaten dan kota tersebut di tuntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang pembangunan daerah, melalui perbaikan infrastruktur maupun sumber daya manusia yang berkualitas (Aryanto, 2011). Pengoptimalan sumber daya tersebut, didukung oleh pemerintah

Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RAPERDA RTRW 2011-2031) dalam pasal 84, berisi tentang rencana kawasan andalan. Dalam rencana tersebut, terdapat berbagai daerah yang di klasifikasikan berdasarkan sektor unggulannya yang berpotensi untuk lebih dikembangkan. Seperti kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata (Perda Prov Jatim 2012). Kawasan andalan tersebut, dapat lebih spesifik sektor unggulan yang akan ditingkatkan dalam proses perencanaan pemerintah terhadap daerah. Kontribusi terhadap PDRB ini berbeda-beda di karenakan laju pertumbuhan antar kabupaten maupun kota di Jawa Timur menunjukkan tingkat yang beragam dan nantinya mengakibatkan perbedaan pendapatan yang diterima di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya disparitas atau ketimpangan regional. Disparitas antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur bisa terjadi juga karena perbedaan sumbangan sektor unggulan

yang ada di Provinsi Jawa Timur. Disparitas pendapatan yang tinggi antar kabupaten dan kota, akan mengakibatkan wilayah tersebut menjadi sulit untuk berkembang. Upaya Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki hal tersebut melalui kebijakan terkait dengan RTRW tentang kawasan andalan yang akan di kembangkan Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sektor-sektor yang di anggap strategis oleh Provinsi. Nantinya dengan kebijakan tersebut akan mengintegrasikan Provinsi daerah dengan pusat melalui rekomendasi pengembangan wilayah. Namun jika Kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalami perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, hal ini yang mengakibatkan sektor yang dianggap strategis oleh Pemerintah Provinsi, menjadi tidak sesuai yang disebabkan karena sektor tersebut tidak basis pada tahun tersebut. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi serta tingkat disparitas yang terjadi antar kabupaten dan kota, dan juga sektor unggulan di wilayah yang maju.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) suatu Negara. Sedangkan untuk Daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Paradigma pembanguana modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli ekonomi menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2000) adalah: 1. Ketahanan (*Sustenance*) 2. Harga diri (*Self Esteem*) 3. *Freedom from servitude*.

### 2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan, harus dibedakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{\text{PDRB riil}_t - \text{PDRB riil}_{t-1}}{\text{PDRB riil}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan

$Y_t$  = Pertumbuhan ekonomi;

$\text{PDRB riil}$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil

$t$  = Periode tahun;

$t-1$  = Periode tahun sebelumnya.

### 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik ruang (*space*) terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Tarigan, 2006): 1. Keuntungan Lokasi; 2. Aglomerasi Migrasi; 3. Arus lalu lintas modal antarwilayah

## 2.4 Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi

Revolusi sosial hampir berawal dari adanya kecemburuan sosial antara golongan sebagai dampak dari kondisi ekonomi dalam masyarakat yang terdiri dari kemiskinan dan ketimpangan, baik ketimpangan antardaerah, antar golongan ataupun ketimpangan antar sektor. Karena itu kerangka pembangunan Nasional Bangsa Indonesia menekankan pada azas “Trilogi pembangunan” yang meliputi *pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas*, ketiga aspek Trilogi pembangunan tersebut merupakan kondisi yang dinamis dan saling bergantian prioritasnya penekanannya dalam setiap rencana pembangunan ekonomi.

Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadi

ketimpangan antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Selain itu (Emilia dan Imelia, 2006) dalam buku Modul Ekonomi Regional faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi adalah: (1) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah. (2) Alokasi Investasi. Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat Investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya Investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif. (3) Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antarwilayah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antarwilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hubungan antara faktor produksi dan kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan antarwilayah dapat di

jelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar. (4) Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antarwilayah. Menurut Kaum Klasik pembangunan ekonomi di daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dengan asumsi SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). (5) Perbedaan Kondisi Demografi Antarwilayah. Ketimpangan Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. (6) Kurang Lancarnya Perdagangan Antarwilayah. Kurang lancarnya perdagangan antardaerah (*intra-trade*) merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Tidak lancarnya *Intra-trade* disebabkan adanya keterbatasan transportasi dan komunikasi.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Analisis Deskriptif Naratif.**

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis data yang telah diuji berdasarkan data kuantitatif sebelumnya. Sehingga hasil analisisnya dapat di deskripsikan lebih pada deskriptif agar mudah dipahami. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan di rumusan permasalahan terkait dengan pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

#### **3.2 Analisis Kuantitatif.**

Analisis kuantitatif yang digunakan berdasarkan empat alat analisis, yaitu tipologi klassen, indeks williamson, indeks entropi theil serta shift share Esteban Marquillas.

#### **3.3 Analisis Tipologi Klassen**

Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Aryanto, 2011). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini kabupaten dan kota yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/

golongan, yaitu: daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah kabupaten yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Sjafrizal, 1997:27–38; Kuncoro dan Aswandi, 2002: 27-43).

### 3.4 Analisis Shift Share.

Analisis Shift Share merupakan analisis yang menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk melihat perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah yang secara administratif lebih tinggi sebagai pembanding (Widodo, 2006: 112). Metode analisis shift share klasik dimulai dengan mengukur perubahan nilai PDRB suatu sektor-*i* di suatu wilayah-*j* (*Dij*) dengan rumus (Soepono, 1993: 45):

$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$  dimana;  $N_{ij} = E_{ij}(r_n)$ ;  $M_{ij} = E_{ij}(r_{in} - r_n)$   $C_{ij} = E_{ij}(r_{ij} - r_{in})$

### 3.5 Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data

dasar (Kuncoro dalam Fajar 2009:38).

$$T_d = \sum \left( \frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left\{ \frac{y_j/Y}{x_j/X} \right\}$$

dimana:

$V_w$  : indeks williamson;

$Y_i$  : PDRB perkapita di kabupaten dan kota;

$y$  :PDRB perkapita rata-rata kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur;

$f_i$  : jumlah penduduk di kabupaten dan kota *i* ;

$n$  : jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur

### 3.6 Analisis Indeks Entropi Theil.

Indeks ini berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; kemudian juga dapat menjadi gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ ketimpangan antardaerah dalam suatu provinsi dan antar subunit daerah dalam satu kawasan (Ying, 2000:60).

$$T_d = \sum \left( \frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left\{ \frac{y_j/Y}{x_j/X} \right\}$$

dimana:

$T_d$  : indeks entropi Theil;

yj : pendapatan perkapita kabupaten dan kota j;

Y :rata-rata Pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur;

xj : jumlah penduduk kabupaten dan kota j;

X : Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian dijabarkan mengikuti alur metode penelitian yang dijelaskan sebelumnya. Penjabaran hasil analisis dibagi kedalam empat alat analisis. Penjelasan secara rinci mengenai hasil penelitian sebagai berikut. Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Pembentukan empat kuadran tersebut yaitu: a). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita wilayah lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur, maka wilayah tersebut tergolong daerah cepat maju dan tumbuh cepat (*high growth and high income*) masuk

kategori kuadran I; b). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wilayah lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur, namun PDRB perkapita yang ada di wilayah lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka wilayah ini tergolong daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) dan masuk dalam kategori kuadran II; c). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wilayah lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur, namun PDRB perkapitanya lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa timur, maka wilayah ini tergolong daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan masuk dalam kategori kuadran III; dan d). jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang ada diwilayah lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka wilayah ini tergolong daerah tertinggal (*low growth and low income*) dan masuk dalam kuadran IV.



**Tabel 1.** Hasil Analisis Tipologi Klassen

Kuadran 1	Kuadran 2
Daerah Maju dan tumbuh cepat	Daerah maju tapi tertekan
<ul style="list-style-type: none"> <li>·Kota Surabaya</li> <li>·Kota Madiun</li> <li>·Kota Malang</li> <li>·Kabupaten Gresik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Kabupaten Tulungagung</li> <li>·Kabupaten Mojokerto</li> <li>·Kabupaten Nganjuk</li> <li>·Kabupaten Tuban</li> <li>·Kabupaten Lamongan</li> </ul>
Kuadran 3	Kuadran 4
Daerah Berkembang cepat	Daerah relatif tertinggal
<ul style="list-style-type: none"> <li>·Kota Kediri</li> <li>·Kota Probolinggo</li> <li>·Kota Mojokerto</li> <li>·Kabupaten Sidoarjo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Kabupaten Pacitan</li> <li>·Kabupaten Ponorogo</li> <li>·Kabupaten Trenggalek</li> <li>·Kabupaten Blitar</li> <li>·Kabupaten Kediri</li> <li>·Kabupaten Malang</li> <li>·Kabupaten Lumajang</li> <li>·Kabupaten Jember</li> <li>·Kabupaten Banyuwangi</li> </ul>

Provinsi Jawa Timur, memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama tahun 2011-2016 adalah sebesar 6,16% kemudian dengan PDRB perkapita sebesar Rp. 8,20 (jutaan). Dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, hasil analisis tipologi kelas, untuk Provinsi Jawa Timur rata-rata wilayahnya berada di kuadran IV, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tergolong daerah yang tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam kuadran III terdapat 4 kabupaten dan kota yang dikategorikan daerah berkembang cepat. Kuadran II terdapat tujuh

kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan. Kuadran I, terdapat empat kabupaten dan kota yang dikategorikan daerah maju dan tumbuh cepat.

#### 4.1 Analisis Indeks Williamson

Angka indeks williamson yang semakin kecil, atau mendekati nol menunjukkan bahwa disparitas semakin kecil atau PDRB perkapita semakin merata. Nilai Vw semakin besar atau menjauhi angka nol, maka disparitas yang terjadi semakin tinggi. Rata-rata disparitas PDRB perkapita yang terjadi di Provinsi Jawa Timur selama 6 tahun

penelitian ini sebesar 0,130. Dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 6,16% selama tahun 2011-2016, disparitas yang terjadi justru semakin tinggi. Daerah yang terus berkembang

tidak mengalami pemerataan, sehingga daerah yang tergolong relatif tertinggal dalam analisis tipologi klassen justru tidak dapat mengikuti perkembangan daerah yang maju tersebut.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Indeks Williamson

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Willimson</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
<b>2011</b>	0,234	-
<b>2012</b>	0,248	<b>5,84</b>
<b>2013</b>	0,261	<b>5,29</b>
<b>2014</b>	0,266	<b>6,17</b>
<b>2015</b>	0,283	<b>6,40</b>
<b>2016</b>	0,305	<b>7,08</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>0,266</b>	<b>6,16</b>

#### 4.2 Analisis Indeks Entropi Theil.

Analisis ini, bertujuan untuk melihat seberapa besar disparitas yang terjadi dalam kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan dalam analisis indeks theil berbeda dengan yang digunakan dalam analisis williamson, pendekatan yang digunakan berdasarkan pendapatan perkapita tiap-tiap daerah. Perbedaan tingkat pendapatan perkapita tiap daerah yang berbeda-beda, akan mengakibatkan disparitas pendapatan. Tingkat disparitas pendapatan dapat dikatakan baik, ketika Td mendekati 0 (nol). Hal ini menjelaskan bahwa tidak terjadi

disparitas pendapatan dalam kabupaten dan kota, namun jika semakin menjauhi nilai nol maka tingkat disparitas pendapatan semakin tinggi.

Pada tahun 2011, Td Provinsi Jawa Timur sebesar 1,998 nilai ini merupakan nilai terbesar selama tahun penelitian dari rentang tahun 2011-2016. Tahun 2012 nilai (Td) tingkat disparitas pendapatan menjadi 1,928. Perubahan nilai Td tersebut cukup baik jika dibandingkan perubahan yang terjadi di tahun 2013, perubahan yang terjadi semakin meningkatnya terjadi disparitas pendapatan antar kabupaten dan kota. Tahun 2014 nilai Td sebesar 1,930 dan mengalami penurunan kembali di tahun

2015 menjadi 1,918. Tahun 2015 dan 2016, nilai  $T_d$  terus mengalami penurunan yang menandakan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten dan kota semakin kecil. Analisis  $T_d$  secara rata-rata yang terjadi di kabupaten

dan kota Provinsi Jawa Timur sebesar 1,931.

**Tabel 3.** Hasil Analisis Indeks Entropi Theil

<b>Tahun</b>	<b><math>T_d</math></b>
<b>2006</b>	<b>1,998</b>
<b>2007</b>	<b>1,926</b>
<b>2008</b>	<b>1,930</b>
<b>2009</b>	<b>1,918</b>
<b>2010</b>	<b>1,914</b>
<b>2011</b>	<b>1,900</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1,931</b>

#### 4.3 Analisis Share Sektor Unggulan.

Berdasarkan analisis tipologi klasen, terdapat 4 daerah yang masuk dalam kategori maju dan berkembang cepat pada kuadran I. Kuadran I ini merupakan daerah yang laju pertumbuhan dan PDRB perkapita lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi. Provinsi Jawa Timur mencantumkan kabupaten dan kota yang ada di kuadran ini dalam kawasan andalan melalui sektor tertentu. RTRW tersebut berlaku selama 20 tahun, selama rentang tahun yang panjang ini, beberapa daerah terjadi transformasi struktural, yang artinya sektor basis pada saat ini, pada beberapa tahun kemudian dapat menjadi non-basis. Selama rentang tahun 2011-2016

pada kuadran I berdasarkan analisis *shift share* pada Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Gresik yang menjadi sektor unggulan kota tersebut.

Di Kota Surabaya, nilai  $N_{ij}$  terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar Rp. 1.401,43 miliar, yang artinya sektor tersebut jika terjadi perubahan kebijakan dalam tingkat provinsi maka kontribusi sektor tersebut akan mengalami perubahan. Namun berbeda dengan sektor pertambangan dan penggalian, nilai  $N_{ij}$  terkecil yaitu sebesar Rp. 266,5 juta, sehingga sektor ini tidak terlalu terpengaruh dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat provinsi.

Peningkatan PDRB membawa dampak pada beberapa faktor, yaitu *industrial mix* (Mij) yang merupakan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa sektoral sebesar Rp. 781,41 miliar. Nilai Mij di Kota Surabaya terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 893,35 miliar, artinya sektor ini mempunyai laju pertumbuhan yang cepat jika di bandingkan dengan sektor lain, seperti sektor jasa-jasa yang memiliki pengaruh negatif sebesar Rp. 233,26 miliar. Kemudian dampak lainnya adalah keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang mampu mempengaruhi pertumbuhan agregat PDRB Kota Surabaya secara positif sebesar Rp.3.382,08 miliar. Serta dampak adanya spesialisasi (Aij) yang mampu mengakibatkan pertumbuhan agregat sebesar Rp. 117,46 miliar.

Kota Malang selama tahun 2011-2016 mengalami kenaikan PDRB rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 859,88 miliar. Kenaikan PDRB ini didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dalam menyumbang besaran PDRB sebesar 52,49%. Kemudian kontribusi terbesar setelah sektor tersebut adalah oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,68%. Nilai Nij yang merupakan pertumbuhan

nasional di Kota Malang ini, terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 233,59 miliar, artinya sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah provinsi yang kebijakannya berhubungan dengan sektor ini. Kemudian nilai Nij terkecil pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 298,07 juta, sehingga dengan terkecilnya nilai Nij sektor ini.

Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2016 terjadi kenaikan rata-rata PDRB sebesar Rp. 1.068,53 milyar. Kenaikan PDRB tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp. 602,27 miliar, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 228,65 miliar. Di Kabupaten Gresik, nilai Nij terbesar dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp. 368,79 miliar, yang artinya sektor tersebut jika terjadi perubahan kebijakan dalam tingkat provinsi yang berhubungan dengan sektor industri tersebut maka kontribusi sektor tersebut akan mengalami perubahan. Namun berbeda dengan sektor konstruksi, nilai Nij terkecil yaitu sebesar Rp.7,35 miliar, sehingga sektor ini tidak terlalu terpengaruh dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat provinsi jika

dibandingkan dengan sektor lainnya. Peningkatan PDRB juga membawa dampak pada beberapa faktor, yaitu (Mij) yang merupakan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor, kenaikan tersebut rata-rata sebesar Rp. 54,46 miliar. Nilai Mij di Kabupaten Gresik terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 87,02 miliar, artinya sektor ini mempunyai laju pertumbuhan yang cepat jika dibandingkan dengan sektor lain, seperti sektor pengangkutan dan transportasi yang memiliki pengaruh negatif sebesar Rp. 1,37 miliar. Dampak lainnya adalah keunggulan kompetitif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan agregat PDRB Kabupaten Gresik secara positif sebesar Rp. 306,10 miliar. Serta dampak adanya spesialisasi (Aij) yang mampu mengakibatkan pertumbuhan agregat menjadi negatif sebesar Rp. 2.218,88 miliar.

Kota Madiun selama tahun 2011-2016 mengalami pertumbuhan PDRB secara rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 152,75 miliar. Peningkatan PDRB ini didominasi oleh sektor perdagangan hotel dan restoran, yaitu sebesar Rp. 76,85 miliar. Nilai Nij yang merupakan pertumbuhan nasional di Kota Madiun ini, terbesar pada sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 42,09 miliar, artinya sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah provinsi yang kebijakannya berhubungan dengan sektor ini. Komponen SS EM selain Nij terdapat Mij yang merupakan bauran industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terbesar. Sehingga jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada di Kota Madiun, sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang cepat sehingga dapat mendorong sektor lainnya. Sektor pertanian nilai Mij negatif Rp. 17,92 miliar yang berarti sektor ini tidak jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, sektor tersebut di Provinsi mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga di Kota Madiun akhirnya mengalami penurunan PDRB di sektor tersebut. Nilai Cij ( $C'ij + Aij$ ) Kota Madiun menunjukkan nilai positif, sehingga secara umum sektor-sektor tersebut memiliki daya saing jika dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur.

Analisis pola pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan alat analisis tipologi klassen, menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011-2016 terdapat rata-rata kabupaten dan kota yang masuk dalam

kuadran IV yaitu tergolong daerah yang tertinggal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi, kemudian selain menggunakan sisi laju pertumbuhan, juga menggunakan perbandingan PDRB perkapita yang daerah tersebut juga berada dibawah rata-rata provinsi. Sehingga daerah kuadran IV ini, memiliki tingkat rata-rata pertumbuhan yang dibawah kabupaten dan kota lainnya. Kemudian dalam kuadran III, merupakan daerah yang berkembang cepat.

Kuadran II dalam analisis tipologi klassen, merupakan daerah yang maju tapi tertekan, artinya dengan tingkat laju pertumbuhan daerah tersebut yang tinggi daripada provinsi, namun PDRB perkapita masih berada dibawah provinsi. Kemudian, terakhir kuadran I yang merupakan daerah yang cepat maju dan bertumbuh cepat. Kuadran ini terdapat empat kabupaten dan kota, yang memiliki laju pertumbuhan dan PDRB perkapita lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur. Laju pertumbuhan dan PDRB perkapita yang baik, daerah ini dapat berkembang dengan cepat. Menurut Sjafrizal (2012:107) adanya perbedaan kuadran tersebut akhirnya

mengakibatkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga mengalami perbedaan. Disparitas pendapatan yang terjadi, dapat melalui dua analisis, yaitu indeks williamson (Vw) dan indeks entropi theil (Td). Analisis Vw menggunakan data PDRB tiap kabupaten dan kota, sebab menurut Sjafrizal (2012:110) karena untuk melihat tingkat pembangunan wilayah, bukan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat maka menggunakan PDRB perkapita. Berdasarkan analisis Vw dan Td disparitas yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, sangat beragam antar kabupaten dan kotanya. Berdasarkan analisis Vw hasilnya menemukan bahwa dalam kuadran III tingkat disparitas tertinggi dibandingkan dengan kuadran lainnya. Tingkat PDRB perkapita kuadran ini lebih tinggi daripada provinsi. Sehingga, disparitas yang terjadi sangat tinggi, antara kuadran III dan kuadran II yang merupakan daerah relatif tertinggal. Pada kuadran III nilai Vw lebih besar (menjauh dari nol) sedangkan kuadran II lebih kecil (mendekati nol). Artinya pada saat Vw mendekati angka nol (0) maka berarti sangat merata distribusi pembangunan antarwilayah. Nilai Vw

mendekati angka satu (1) berarti disparitas yang terjadi sangat tinggi atau terjadi ketimpangan (Sjafrizal, 2012:111). Selisih antara kuadran II dan III sangat tinggi, disebabkan dalam analisis tipologi klassen yang menggunakan PDRB perkapita, kuadran II ini tergolong PDRB perkapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi. Analisis Vw tingkat disparitasnya kecil atau mendekati pemerataan dari segi pembangunan antar wilayahnya. Namun menurut Raswita dan Utama (2013), jika indeks Vw berada pada kondisi  $Vw < 0,5$ , disparitas yang terjadi masih tergolong rendah, hal ini terlihat pada kuadran II dan IV yang nilai Vw kurang dari 0,5 sehingga disparitas yang terjadi di kuadran ini tergolong rendah.

Indeks lainnya untuk menghitung tingkat disparitas pembangunan antar wilayah adalah indeks entropi theil (Td) yang menggunakan data pendapatan kabupaten dan kota sebagai variabelnya. Sehingga analisis ini dapat menjadi pembandingan dari analisis Vw yang menggunakan PDRB perkapita. Berdasarkan hasil analisis ini, pada kuadran III memiliki tingkat disparitas pendapatan terbesar jika dibandingkan dengan kuadran IV sebagai daerah yang

relatif tertinggal lebih rendah disparitas yang terjadi. Kuadran III ini didominasi oleh kabupaten dan kota yang memiliki tingkat pendapatan terbesar (jika dibandingkan dengan kuadran lain). Nilai pendapatan daerah tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan daerah yang masuk dalam kuadran I, namun karena di Kota Mojokerto jumlah penduduknya terkecil daripada kabupaten dan kota lainnya.

Hasil analisis Vw dan Td diatas, membuktikan bahwa di Provinsi Jawa Timur terjadi disparitas pembangunan antarwilayah. Selama tahun 2011-2016, hasil analisis tersebut menunjukkan trend disparitas semakin meningkat antarwilayahnya. Hasil ini menunjukkan bahwa teori Kuznet tentang hipotesis U terbalik, berlaku dalam penelitian ini, karena disparitas yang terjadi menunjukkan bahwa semakin tinggi disparitas yang terjadi, dengan teori ini disparitas pada titik puncaknya akan menurun tingkat kesenjangan yang terjadi, atau semakin mendekati pemerataan. Sedangkan menurut Sjafrizal (2012:115) bahwa, ketika suatu pembangunan ekonomi yang ada disuatu wilayah, hal tersebut akan terus meningkat terjadi

ketimpangan, namun pada titik tertentu akan menurun atau menuju pemerataan.

Selama penelitian, trend disparitas tidak menandakan akan terjadi penurunan, berarti disparitas yang terjadi belum pada puncaknya sehingga ada kemungkinan ditahun berikutnya akan mengalami ketimpangan yang lebih tinggi daripada tahun penelitian ini. Beberapa penyebab terjadinya disparitas ekonomi antarwilayah menjadi tinggi, yaitu; karena adanya perbedaan sumber daya alam (SDA) sebab dengan adanya SDA yang baik, maka wilayah tersebut memiliki lahan yang dapat mendorong sektor pertanian sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa sebagai pendorong perekonomian; kemudian kondisi demografis juga menjadi penyebab disparitas, karena dengan kondisi ini ketika jika wilayah tersebut terkendala dengan kondisi alam, maka investor cenderung menghindari wilayah tersebut untuk berinvestasi; mobilitas barang dan jasa yang kurang baik, antarwilayah memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, kemudian dari segi transportasi yang ada juga cenderung berbeda, seperti misalnya Kota Surabaya memiliki transportasi dan komunikasi yang baik, sehingga perekonomian dapat

berkembang dengan baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan, tingkat pendapatan daerahnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kota Surabaya. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya transportasi, baik dari darat, laut maupun udara, Kota Surabaya fasilitas tersebut terlengkapi. Namun, Kabupaten Pacitan yang menjadi transportasi hanya melalui darat dan laut, sehingga transportasi kurang mendukung

Penyebab lain terjadi disparitas ekonomi adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antarwilayah. Tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah mempengaruhi tingkat disparitas, sebab pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada wilayah yang menjadi konsentrasi ekonomi tersebut. Berdasarkan teori Myrdal, hal ini disebabkan dampak *spread effect* dan dampak *backwash effect*. Sebagai upaya mengatasi disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten dan kota, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan otonomi atau desentralisasi maka dana investasi pemerintah akan lebih dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah



akan berkurang. Upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan sektor-sektor dalam kawasan andalan. Berdasarkan Perda Jatim Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi tahun 2011-2031 mengenai kawasan andalan yang tertera di Pasal 84, kabupaten dan kota yang memiliki sektor unggulan pengembangannya diarahkan ke sektor tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 84 ayat 2 berisi tentang: kawasan Gresik, Surabaya dengan sektor unggulan yang dikembangkan adalah sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; kemudian kawasan Madiun dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan dan pariwisata; dan kawasan Malang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Dengan menggunakan analisis tipologi klassen, kabupaten dan kota tersebut masuk dalam kategori kuadran I yang menjadi daerah yang maju. Berdasarkan hasil analisis shift share Esteban Marquillas, yang bertujuan untuk melihat sektor kompetitif dan spesialisasi di wilayah

tersebut, ditemukan bahwa yang dikategorikan sektor unggulan pada kawasan andalan, terdapat beberapa sektor tersebut tidak kompetitif dan berspesialisasi pada sektor tersebut.

Kota Surabaya berdasarkan Pasal 84, memiliki empat sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sektor pertanian dan subsektor perikanan, secara umum hasil analisis SS EM selama tahun 2006-2011 untuk pengaruh kompetitif (C'ij) bernilai negatif, artinya sektor tersebut memiliki tidak keunggulan yang kompetitif. Sektor tersebut berdasarkan spesialisasi (A'ij) yang merupakan bagian dari pengaruh C'ij, bernilai positif. Sehingga A'ij sektor tersebut berarti, sektor tersebut memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Sektor industri memiliki keunggulan sektor yang kompetitif, namun tidak memiliki spesialisasi untuk sektor tersebut. Sedangkan sektor pariwisata, berdasarkan Tabel I-O sektor tersebut masuk dalam subsektor jasa hiburan dan rekreasi pada sektor jasa-jasa.

Kota Surabaya memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada sektor ini. Sehingga sektor industri memiliki keunggulan pada sektor tersebut

yang dapat bersaing pada sektor yang sama di wilayah lain, namun saat ini Kota Surabaya belum berspesialisasi pada sektor ini dalam mengembangkan wilayahnya. Sektor pertanian dan perikanan, Kota Surabaya memiliki Spesialisasi di sektor tersebut, namun secara kompetitif belum mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain.

Kota Surabaya memiliki sektor yang berspesialisasi dan keunggulan yang kompetitif pada tiga sektor, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi. Sektor ini berkembang dengan baik di Kota Surabaya karena Kota Surabaya sudah tergolong daerah yang maju (hasil analisis tipologi klassen) sehingga arah pembangunan lebih pada arah modern. Didukung oleh teori W. Arthur Lewis tentang teori model dua sektor, bahwa pada negara berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pola pertanian subsisten tradisional menuju yang lebih modern, cenderung pada orientasi kehidupan perkotaan, yang memiliki sektor industri manufaktur yang bervariasi dan sektor jasa yang baik (Todaro, 2004:133).

Kota Malang berdasarkan Pasal 84, memiliki lima sektor unggulan, yaitu pertanian, perkebunan, pertanian,

industri dan pariwisata. Sektor pertanian dan pariwisata yang ada dalam sektor jasa-jasa berdasarkan analisis SS EM tahun 2011-2016 hasil C'ij menunjukkan nilai positif, sehingga kedua sektor tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Tapi dari spesialisasi kedua sektor tersebut tidak ada yang memiliki spesialisasi (nilai A'ij negatif). Sedangkan sektor industri Kota Malang tidak memiliki keunggulan kompetitif namun memiliki spesialisasi di sektor ini. Sehingga, jika pengembangan kawasan di Kota Malang berdasarkan Pasal 84 tersebut, dapat mendorong perekonomian Kota Malang. Karena dari sisi keunggulan Kompetitif (C'ij) sektor yang berkontribusi besar, setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran kemudian sektor jasa-jasa, sehingga dapat mendorong perekonomian sektor lainnya untuk berkembang. Sedangkan Sektor industri dan pertanian, meskipun keunggulan kompetitifnya negatif, namun spesialisasinya tergolong berkontribusi terbesar dari keseluruhan A'ij. Sektor ini dapat berkembang agar mampu menjadi sektor yang berkontribusi dengan naik dalam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. PDRB Kota Malang, selama tahun 2011-2016 mengalami

penurunan pada sektor pertanian, dan mengalami peningkatan pada sektor industri pengolahan, menurut Djohadikusumo dalam Masli (2010:3), perubahan sektor yang mengalami penurunan pada sektor primer menjadi peningkatan pada sektor sekunder, khususnya sektor industri pengolahan merupakan transformasi ekonomi menuju industrialisasi.

Kabupaten Gresik dalam kawasan andalan memiliki sektor unggulan yang sama dengan Kota Surabaya, yaitu sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Berdasarkan analisis SS EM, sektor pertanian, perikanan, sektor industri dan pariwisata yang masuk dalam sektor jasa-jasa memiliki nilai keunggulan kompetitif (C'ij) yang positif, namun tidak memiliki spesialisasi di sektor tersebut. Selain sektor tersebut, yang memiliki nilai C'ij positif adalah sektor pengangkutan dan transportasi serta sektor jasa-jasa. Kedua sektor ini memiliki nilai C'ij yang tinggi dalam berkontribusi dari total C'ij Kota Gresik, namun juga tidak memiliki A'ij yang positif, sehingga tidak memiliki spesialisasi di sektor ini. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi yang positif

adalah sektor pertambangan dan penggalian. Namun, sektor ini tidak tergolong menjadi kawasan andalan dalam Kabupaten Gresik.

Kota Madiun, yang juga sebagai daerah yang maju dengan berdasarkan pasal 84 tersebut, kota ini merupakan kawasan andalan dengan sektor pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut. Hasil analisis SS EM, menunjukkan bahwa sektor tersebut yang masuk dalam kawasan andalan kota ini memiliki C'ij yang positif artinya sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Keempat sektor tersebut meski memiliki keunggulan yang kompetitif, namun tidak memiliki spesialisasi pada sektor tersebut. Sehingga, dengan keunggulan kompetitif tersebut jika berkembang dengan baik dapat meningkatkan spesialisasi kota ini untuk masing-masing sektor tersebut. Sektor lainnya, yang berkontribusi besar dalam perekonomian Kota Madiun, pada keunggulan kompetitif ada sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan. Kontribusi kedua juga di berikan pada sektor pengangkutan dan transportasi, yang dapat memberi kontribusi yang lebih tinggi terhadap nilai C'ij sektor perdagangan dan restoran.

Berdasarkan analisis tersebut, dalam analisis tipologi kelas pada kuadran I yang menjadi daerah yang maju kemudian disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2010, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik dan Kota Madiun terdapat beberapa sektor yang menjadi potensial untuk dikembangkan, namun dalam kawasan andalan, sektor tersebut belum dalam kategori sektor unggulan. Sehingga ketika suatu daerah terjadi transformasi struktural, RTRW Provinsi Jawa Timur dalam jangka panjang menentukan kawasan andalan ini terlalu panjang rentangnya, yaitu selama 20 tahun. Sedangkan selama tahun 2006-2011 saja sudah terjadi transformasi struktural pada perekonomian kabupaten dan kota diatas. Namun, berdasarkan pasal 13 ayat 12 dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, strategi pengembangan kawasan andalan yang ada pada pasal 84 dilakukan dengan mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Hal ini melalui, mengakomodasi penetapan kawasan andalan di wilayah

Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pengembangan kawasan andalan nasional; dan mendukung pengembangan kawasan andalan agar terintegrasi dan operasional.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis deskriptif maupun kuantitatif diatas selama penelitian tahun 2011-2016 di Provinsi Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan alat analisis tipologi kelas, yang membagi daerah menjadi empat kuadran, rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur berada pada kuadran IV. Terdapat 23 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kuadran ini, daerah merupakan daerah yang relatif tertinggal. Analisis tingkat disparitas pendapatan, dengan menggunakan alat analisis indeks williamson Vw dan indeks theil Td. Jika dilihat dari sisi tahunan, dengan menggunakan Td perekonomian membaik, meski masih terjadi disparitas pendapatan, namun jika menggunakan analisis Vw perekonomian justru mengalami tingkat disparitas yang terus meningkat. Sektor unggulan pada masing-masing

kota di kuadran I, rata-rata yang menjadi kawasan andalan Provinsi Jawa Timur sektor tersebut hanya memiliki keunggulan kompetitif (C'ij) namun tidak memiliki spesialisasi (Aij), begitu juga sebaliknya. Kota Surabaya, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi, sektor ini tidak menjadi kawasan andalan bagi Kota Surabaya. Kota Malang, yang menjadi sektor unggulan (C'ij) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian tidak memiliki keunggulan kompetitif namun memiliki spesialisasi (Aij). Kota madiun, sektor dengan C'ij yang positif namun tidak memiliki Aij, pada sektor jasa-jasa; pengangkutan dan transportasi; dan perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan di Kabupaten Gresik, sektor yang memiliki C'ij positif adalah industri pengolahan, sektor pengangkutan dan transportasi serta sektor jasa yang terbesar. Namun, sektor pertambangan dan penggalian meskipun memiliki C'ij dan Aij positif, tapi tidak menjadi prioritas dalam kawasan andalan di Kabupaten Gresik.

## 5.2 saran

1. Peningkatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur Kabupaten dan Kota harus ditingkatkan, hal ini agar disparitas antar wilayah tidak berjarak terlalu lebar.
2. Adanya pembanguann ekonomi yang merata di semua sektor ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggi.
3. Menghindari urbanisasi sektoral adalah dengan cara mengurangi disparitas regional kota dan kabupaten di Jawa Timur yang besar. Salah satunya adalah pembungunan dan perekonomian yang merata antar sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Rudi. 2011. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Fajar Utama, Putra. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008*.

- Jhingan, Ml. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad dan Hairul Aswandi. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol 17, Nomor 1, Tahun 2002: 27-45. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masli, Lili. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: STIE STAN.
- Nurikhsan, Diky. 2007. *Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Kota Cimahi Periode 2003-2005*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031*.
- Prawira, Yudha. 2011. *Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001-2010*. Riau: Universitas Riau.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, No. 3, Tahun Xxvi : 2738. Jakarta: LP3ES.
- Soepono, Prasetyo. 1993. *Analisis Shift Share Perkembangan dan Penerapan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. No 1. Yogyakarta: UGM
- Suryana. 2000. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, MP dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Usya, Nurlatifa. 2006. *Analisis Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Subang*. Bogor: IPB.

Ying, Long. 2000. *China's Regional Disparitas During The Reform Periode.* Dalam *Journal Economic Geography.*